

RENCANA AKSI BADA

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Output Program	Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	2,520,465,661	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,520,465,661	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166,871,050
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,611,000
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	810,659,161

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	11,711,692,910	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A (84)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11,711,692,910	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A (84)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190,000,000

3	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	34,942,809,999	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	31,644,751,749	Penetapan APBD Tepat Waktu	%	100	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,813,229,089

Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	%	95	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	967,000,000

			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	27,613,022,660
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	%	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,251,500,000

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,298,058,250	Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,298,058,250
--	---------------	---	---	-----	------------------------------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**N PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

Output Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi										
							Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah BPKAD	4 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,247,850	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMDBPKAD	2 Dokumen	1). Mengumpulkan usulan RKBMD dan RKPBMDB dari Sekretariat Bidang-Bidang											
						2). Menelaah usulan RKBMD dan RKPBMDB											
						3). Menyusun dokumen RKBMD dan RKPBMDBPKAD											
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95,100,000	Jumlah kendaraan/ bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	1). Membuat perjanjian Asuransi Gedung Kantor dengan Perusahaan Asuransi											
						2). Membuat perjanjian Asuransi Kendaraan Roda 2 dengan Perusahaan Asuransi											
						3). Membuat perjanjian Asuransi Kendaraan Roda 4 dengan Perusahaan Asuransi											
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	64,523,200	Jumlah laporan barang semester dan akhir tahun	2 Dokumen	1). Melaksanakan rekonsiliasi BMD Semester I Tahun 2022 dengan Bidang Aset Daerah BPKAD												
					2). Menyusun Laporan Barang BPKAD Semester I Tahun 2022												
					3). Melaksanakan rekonsiliasi BMD Akhir Tahun 2022 dengan Bidang Aset Daerah BPKAD												
					4). Menyusun Laporan Barang BPKAD Akhir Tahun 2022												
	Jumlah dokumen pelaporan kepegawaian BPKAD	12 Dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23,611,000	Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai	70 Buah	Belanja pengadaan pakaian batik										
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,000,000	Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	1). Melaksanakan monitoring kinerja pegawai										
						2). Menyusun laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai											
Jumlah waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi umum BPKAD	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,586,100	Jumlah komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor	12 Jenis	Belanja alat-alat listrik											

					Belanja alat kantor lainnya														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217,256,170	Jumlah peralatan kantor, Jumlah perlengkapan kantor	30 Jenis, 10 Unit	1). Belanja perabot kantor													
						2). Belanja modal personal computer													
						3). Belanja modal peralatan personal computer													
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,482,300	Jumlah peralatan rumah tangga	20 Jenis	Belanja peralatan rumah tangga													
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78,269,200	Jumlah jasa prasarana aparatur	34 Jenis	Belanja alat/ bahan kebersihan kantor													
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,630,000	Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan, Jumlah penjilidan	6 Jenis, 14936 Lembar, 100 Buku	1). Pengadaan barang cetakan													
						2). Belanja penggandaan													
						3). Belanja penjilidan													
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	Jumlah iklan media massa, Jumlah penyediaan bahan bacaan	12 Kali, 150 Eksemplar	1). Pembayaran iklan di media massa													
						2). Pembayaran bahan bacaan/ koran													
		Penyediaan Bahan/Material	67,197,400	Jumlah alat tulis kantor	19 Jenis	Belanja alat tulis kantor													
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	58,115,000	Jamuan tamu dan makan minum harian, jumlah makan minum rapat	14 Jenis, 1200 dus	1). Penyediaan jamuan tamu													
						2). Penyediaan makan dan minum harian													
						3). Penyediaan makan dan minum rapat													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249,818,000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	31 Kali	Belanja Perjalanan Dinas													
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20,304,991	Jumlah dokumen yang diarsipkan	12 Dokumen	Melaksanakan penatausahaan Arsip BPKAD													
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25,000,000	Pengelolaan website BPKAD	1 Website	Melaksanakan pengelolaan Website BPKAD													
Jumlah pengadaan barang milik daerah	76 Buah	Pengadaan Mebel	33,645,000	Jumlah meubelair kantor	76 Buah	Belanja modal kursi susun chitose													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,119,500	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Melaksanakan pengadaan interior ruangan													
Jumlah bulan penyediaan jasa perkantoran	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	Jumlah materai Jumlah buku cek	234 Buah 9 Buku	1). Belanja Buku Cek													
						2). Belanja Materai													

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	259,008,000	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan listrik	12 Bulan	1). Pembayaran Tagihan Telepon													
						2). Pembayaran Tagihan Listrik													
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,391,500	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	1). Pemeliharaan LCD / Infocus													
						2). Pencucian AC (Kulkas)													
						3). Isi Gas Freon R.134 (Kulkas)													
						4). Service (Televisi)													
						5). Pemeliharaan Kamera													
						6). Pemeliharaan Note Book / Laptop													
						7). Pemeliharaan Scanner													
						8). Service Monitor													
						9). Service CPU													
						10). Up Grade Sistem													
						11). Pemeliharaan Printer													
						12). Pemeliharaan Jaringan Komputer													
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503,112,000	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor, Jumlah jasa kebersihan kantor, Jumlah jasa Supir Kepala Badan, Jumlah jasa tenaga administrasi	4 Orang, 6 orang, 1 orang, 1 orang	1). Pembayaran honorarium non PNS sebagai tenaga teknis dalam kegiatan													
						2). Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service)													
						3). Pembayaran Jasa Petugas Satpam													
						4). Pembayaran Jasa Petugas Pengemudi													
Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	76 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259,747,100	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	20 Unit	1). Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas													
						2). Penggantian Suku Cadang													
						3). Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan													
						4). Penyediaan Jasa Service Kendaraan Jabatan													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	103,086,400	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	2 Unit	1). Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas													
						2). Penggantian Suku Cadang													
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3). Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan													
						4). Penyediaan Jasa Service Kendaraan Operasional													

		Pemeliharaan Mebel	14,585,000	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	53 Unit	1). Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor													
						2). Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel													
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241,629,950	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1). Pemeliharaan Apar													
						2). Pemeliharaan Genset													
						3). Isi Gas Freon R 22 (AC)													
						4). Pencucian (AC)													
						5). Pemeliharaan Gedung Kantor													
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BPKAD	11 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000	Jumlah dokumen rencana kerja	2 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun Renja dan Renstra													
				Jumlah dokumen rencana strategis	1 Dokumen	2). Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja dan Renstra													
						3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja dan Renstra													
						4). Pengumpulan Data dan Informasi													
						5). Penyusunan Rancangan Renja dan Renstra													
						6). Rapat Pembahasan Rancangan Renja dan Renstra													
						7). Penyesuaian rancangan Renja dan Renstra berdasarkan hasil rapat pembahasan													
						8). Penetapan Renja dan Renstra													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	13 RKA	1). Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Tasikmalaya													
						2). Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD													

				3). Mengecek kesesuaian RKA-SKPD dengan dokumen Renja SKPD														
				4). Mengecek kesesuaian RKA-SKPD dengan analisis standar biaya dan standar satuan harga														
				5). Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan														
				6). Menginput RKA-SKPD ke dalam SIPD														
				7). Mencetak RKA-SKPD dari SIPD														
				8). Melaksanakan asistensi kepada TAPD														
				9). Menyampaikan RKA-SKPD untuk direview oleh Inspektorat														
				10). Memperbaiki RKA-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD														
				11). Mencetak RKA-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran														
				12). Menyampaikan RKA-SKPD kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk bahan pencetakan DPA-SKPD														
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPKAD	13 RKAP	1). Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKAP-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Tasikmalaya													
					2). Koordinasi penyusunan dokumen RKAP-SKPD													
					3). Mengecek kesesuaian RKAP-SKPD dengan dokumen Renja SKPD													
					4). Mengecek kesesuaian RKAP-SKPD dengan analisis standar biaya dan standar satuan harga													

				5). Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan													
				6). Menginput RKAP-SKPD ke dalam SIPD													
				7). Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD													
				8). Melaksanakan asistensi kepada TAPD													
				9). Menyampaikan RKAP-SKPD untuk direview oleh Inspektorat													
				10). Memperbaiki RKAP-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD													
				11). Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran													
				12). Menyampaikan RKAP-SKPD kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk bahan pencetakan DPA-SKPD													
			85,000,000	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)											
				Jumlah laporan evaluasi triwulanan	4 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun LKIP											
				Jumlah laporan pelaksanaan zona integritas	1 Dokumen	2). Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun LKIP											
				Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen	3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja Tim Penyusun LKIP											
						4). Pengumpulan Data dan Informasi											
						a. Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program/kegiatan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat											
						b. Laporan capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran											
						5). Penyusunan Rancangan LKIP											
						a. Menganalisis dan mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)											
						b. Menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja sasaran strategis											

						3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja Tim Zona Integritas BPKAD													
						4). Pengumpulan Data dan Informasi													
						5). Sosialisasi Zona Integritas													
						7). Penyusunan Draft Laporan Zona Integritas													
						8). Rapat Pembahasan Draft Laporan Zona Integritas													
						9). Penyesuaian Draft Laporan Zona Integritas													
						10). Pengesahan Laporan Zona Integritas													
						Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah													
						1). Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKAD													
						2). Penyusunan Agenda Kerja Satgas SPIP													
						3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja Satgas SPIP													
						4). Pengumpulan Data dan Informasi													
						5). Sosialisasi SPIP													
						6). Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)													
						7). Penyusunan Draft Laporan Penyelenggaraan SPIP													
						8). Rapat Pembahasan Draft Laporan Penyelenggaraan SPIP													
						9). Penyesuaian Draft Laporan Penyelenggaraan SPIP													
						10). Pengesahan Laporan Penyelenggaraan SPIP													
Jumlah dokumen pelaporan keuangan BPKAD	10 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,416,692,910	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN													
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,000,000	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	Menyusun Dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran secara Administratif dan Secara Fungsional													

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	4 Dokumen	1). Menerima dan memverifikasi SPJ pengajuan pencairan kegiatan beserta kelengkapannya													
						2). Melakukan input data SPJ dengan kelengkapannya di dalam Sistem													
						3). Memeriksa dan mengotorisasi data SPP dan SPM													
						4) Persetujuan dan penandatanganan SPP dan SPM													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60,000,000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						2). Penyusunan Agenda Kerja													
						3). Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban													
						4) Jurnal Penyesuaian SKPD dan Konsolidasi Laporan Keuangan													
						5) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15,000,000	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1) Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD													
						2) Penyusunan Agenda Kerja													
						3) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban													
						4) Jurnal Penyesuaian SKPD dan Konsolidasi Laporan Keuangan													
						5) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran													
Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	23 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	208,892,000	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun KUA dan PPAS													
						2). Penyusunan Agenda Kerja													
						3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja													
						4). Pengumpulan Data dan Informasi													
						5). Pelaksanaan Kegiatan													
						6). Evaluasi dan Penyusunan Laporan													
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	208,892,000	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun Perubahan KUA dan PPAS													

					2). Penyusunan Agenda Kerja															
					3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja															
					4). Pengumpulan Data dan Informasi															
					5). Pelaksanaan Kegiatan															
					6). Evaluasi dan Penyusunan Laporan															
					1). Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya															
					2). Pengumpulan Data Bahan Verifikasi RKA SKPD															
					3). Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD															
					4). Evaluasi Hasil Verifikasi RKA SKPD															
					1). Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya															
					2). Pengumpulan Data Bahan Verifikasi RKAP SKPD															
					3). Pelaksanaan verifikasi RKAP SKPD															
					4). Evaluasi Hasil Verifikasi RKAP SKPD															
					1). Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah															
					2). Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD															
					3). Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS															
					4). Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD															
					5). Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD															
					2). Penyusunan Agenda Kerja															
					3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja															
					4). Pengumpulan Data dan Informasi															
					5). Pelaksanaan Kegiatan															
					6). Evaluasi dan Penyusunan Laporan															
					1). Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya															
					2). Pengumpulan Data Bahan Verifikasi RKA SKPD															
					3). Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD															
					4). Evaluasi Hasil Verifikasi RKA SKPD															
					1). Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya															
					2). Pengumpulan Data Bahan Verifikasi RKAP SKPD															
					3). Pelaksanaan verifikasi RKAP SKPD															
					4). Evaluasi Hasil Verifikasi RKAP SKPD															
					1). Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah															
					2). Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD															
					3). Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS															
					4). Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD															
					5). Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD															

				6). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD																		
				7). Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah																		
				8). Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi																		
				9). Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
				10). Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD																		
				11). Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur																		
				12). Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi																		
				13). Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur																		

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	298,391,540	Jumlah Ranperda Perubahan APBD, Jumlah Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	1 Ranperda, 1 Ranperwal, 1 Ranperwal	1). Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD																				
				2). Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS																				
				3). Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				
				4). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD																				
				5). Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah																				
				6). Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi																				
				7). Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				

					8). Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD													
					9). Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur													
					10). Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi													
					11). Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur													
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	612,228,599	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	4 Dokumen	1). Pelaksanaan Koordinasi/Rapat-rapat dengan Provinsi dan Pusat													
					2). Pelaksanaan Koordinasi/ Rapat-rapat dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya													
					3). Pengumpulan Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023													
					4). Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023													

					5). Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023														
					6). Penyusunan Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023														
					7). Pembahasan Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023 Antar Eksekutif														
					8). Penyusunan Revisi Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023 hasil Pembahasan antar Eksekutif														
					9). Kajian Antar Daerah Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023														
					10). Penyempurnaan Akhir Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2023														
					11). Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2023														
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	45,470,200	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pendapatan	4 Dokumen	1). Pengumpulan Data Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
					2). Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
					3). Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
					4). Penyusunan Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														

				5). Pembahasan Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
				6). Penyusunan Revisi Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
				7). Penyempurnaan Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah														
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	45,470,200	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	4 Dokumen	1). Pengumpulan data bahan perencanaan anggaran belanja daerah														
				2). Verifikasi dan evaluasi data bahan perencanaan anggaran belanja daerah														
				3). Pengolahan data hasil verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran belanja daerah														
				4). Penyusunan draft laporan hasil perencanaan anggaran belanja daerah														
				5). Pembahasan draft laporan hasil perencanaan anggaran belanja daerah														
				6). Penyusunan revisi draft laporan hasil perencanaan anggaran belanja daerah														
				7). Penyempurnaan laporan hasil perencanaan anggaran belanja daerah														
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	45,470,200	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	4 Dokumen	1). Pengumpulan data bahan perencanaan anggaran pembiayaan														
				2). Verifikasi dan evaluasi data bahan perencanaan anggaran pembiayaan														
				3). Pengolahan data hasil verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran pembiayaan														

						4). Penyusunan draft laporan hasil perencanaan anggaran pembiayaan													
						5). Pembahasan draft laporan hasil perencanaan anggaran pembiayaan													
						6). Penyusunan revisi draft laporan hasil perencanaan anggaran pembiayaan													
						7). Penyempurnaan laporan hasil perencanaan anggaran pembiayaan													
Jumlah dokumen penatausahaan keuangan daerah	128 Dokumen	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28,133,000	Jumlah dokumen B9	12 Dokumen	1). Input data SP2D dan STS													
						2). Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah													
						3). Penyusunan dokumen B9													
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	65,375,000	Jumlah anggaran kas Perangkat Daerah	435 Anggaran Kas	Verifikasi anggaran kas Perangkat Daerah pada DPA SKPD yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada kas daerah													
				Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	300 DPA	Verifikasi DPA SKPD													
				jumlah DPPA SKPD yang di verifikasi	300 DPPA	Verifikasi DPPA SKPD													
				Jumlah SPD terbit	858 SPD														
						Penerbitan SPD													
						1). Memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggarankas dan menerbitkan SPD													
						2). Mencetak SPD													
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	82,715,000	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi hibah dan bansos	4 Dokumen	1). Melaksanakan sosialisasi hibah dan bansos													
						2). Melaksanakan rekonsiliasi hibah dan bansos													
						3). Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos													
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	104,371,000	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	1). Melaksanakan pemantauan dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana pada Kas Daerah (RKUD)													

				2). Melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah																
				3). Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan yang berkaitan dengan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah																
				4). Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun pelaporan-pelaporan terkait Dana Transfer																
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	59,875,000	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan transaksi non tunai	4 Dokumen	1). Sosialisasi penerapan transaksi non tunai kepada stakeholder																
				2). Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai																
				3). Penyusunan laporan pelaksanaan transaksi non tunai																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	435,590,000	Jumlah dokumen ledger gaji yang diterbitkan	12 Dokumen	1). Verifikasi leger gaji yang diajukan dari Perangkat Daerah																
				Jumlah SP2D yang diterbitkan	7500 SP2D	2). Verifikasi kelengkapan data SPP dan SPM yang disampaikan Perangkat Daerah														
				Jumlah SPM yang diverifikasi		7500 SPM	3). Penerbitan SP2D atas SPP dan SPM yang diajukan													
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	70,683,000	Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	12 Dokumen	1). Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala setiap bulan dengan Instansi terkait																
				2). Menyusun laporan hasil rekonsiliasi																
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	46,590,000	Jumlah Rancangan SK tentang PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu	80 Rancangan SK	Membuat Rancangan SK tentang PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu																

		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73,668,000	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan daerah	75 Orang	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan keuangan daerah																		
Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi serta Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Melaksanakan pengelolaan alokasi subsidi																		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	27,363,022,660	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Melaksanakan pengelolaan belanja tidak terduga (BTT)																		
Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah	20 Dokumen	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	70,000,000	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	2 Dokumen	1). Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi																		
						2). Penyusunan agenda kerja																		
						3). Rekonsiliasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan secara periodik																		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	70,000,000	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	12 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
						2). Penyusunan agenda kerja																		
						3). Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban																		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125,000,000	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya																		
2). Penyusunan Agenda Kerja																								
3). Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan																								
4). Penyusunan jurnal Penyesuaian pada masing-masing SKPD dan Konsolidasi Laporan Keuangan																								
5). Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited ke BPK RI																								
6). Penyusunan jurnal koreksi atas pemeriksaan terinci oleh BPK RI																								
7). Penyerahan LHP oleh BPK RI																								
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	300,000,000	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Jumlah Ranperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda, 1 Ranperwal	1). Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Ranperda																				
				2). Penyusunan Agenda Kerja																				
				3). Rapat Pembahasan Agenda Kerja																				
				4). Pengumpulan Data dan Informasi																				

		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5). Penyusunan Rancangan Perda dan Perwal												
						6). Penyampaian Ranperda P2APBD ke DPRD												
						7). Rapat Pembahasan Rancangan Perda bersama DPRD												
						8). Persetujuan Bersama atas Ranperda P2APBD												
						9). Evaluasi Ranperda P2APBD oleh Provinsi												
						10). Penetapan Perda P2APBD												
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	185,000,000	Jumlah dokumen laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 Dokumen	1). Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis												
						2). Penyusunan agenda kerja												
						3). Pelaksanaan dan penatausahaan tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah												
						4). Penyusunan laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah												
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,000,000	Jumlah laporan indeks pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim penyusunan laporan indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)												
						2). Penyusunan agenda kerja												
						3). Pembahasan dan analisa laporan IPKD												
						4). Penyusunan laporan IPKD												
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	401,500,000	Jumlah peserta pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	100 Orang	Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah												
Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	81 Dokumen	Penyusunan Standar Harga	166,781,900	Jumlah dokumen standar harga Pemerintah Kota Tasikmalaya	1 Dokumen	1). Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga												
						2). Pengumpulan Data dan Informasi a. Usulan Harga Barang b. Survei Harga Barang												
						3). Penyusunan Standar Harga												
						4). Rapat Pembahasan												

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,589,277,600	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Jumlah dokumen Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah, Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 6 Unit	5). Entry Harga Standar Harga																		
				6). Penetapan Standar Harga Barang																		
				1). Menghimpun usulan RKBMD, RKPBM dan Rencana Hibah BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang dari semua Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya																		
				2). Penelaahan atas usulan RKBMD, RKPBM dan Rencana Hibah BMD																		
				3). Menyusun DKBMD, DKPBMD dan Daftar Hibah BMD																		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	314,378,300	Jumlah dokumen penatausahaan barang Perangkat Daerah	38 Dokumen	4). Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas jabatan																		
				1). Melaksanakan kompilasi data KIB dari semua Perangkat Daerah																		
				2). Melaksanakan rekapitulasi serta rekonsiliasi dengan bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan fungsi akuntansi dalam rangka penyusunan LKPD																		
Inventarisasi Barang Milik Daerah	57,704,000	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	2 Dokumen	3). Menyusun laporan penatausahaan barang Perangkat Daerah																		
				1). Memberikan kode dan identitas atas barang milik daerah																		
				2). Mengadministrasikan dalam Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan																		
Pengamanan Barang Milik Daerah	626,175,450	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pengelolaan Aplikasi Protasik	100 Sertifikat, 1 Aplikasi	3). Menyusun laporan inventarisasi barang milik daerah																		
				1). Melaksanakan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum pada Perangkat Daerah																		

				2). Mengumpulkan data/ bahan untuk penerbitan sertifikat															
				3). Melaksanakan pendaftaran bidang tanah yang akan di sertifikatkan ke BPN															
				4). Melaksanakan pengukuran bidang tanah yang akan disertifikatkan dengan BPN															
				5). Melaksanakan pengelolaan aplikasi Protasik															
Penilaian Barang Milik Daerah	61,439,000	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	2 Dokumen	1). Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah															
				2). Melaksanakan penilaian oleh tim penilai barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan atau dilakukan penilaian oleh tim penilai independen bersertifikat															
				3). Membuat hasil penilaian barang															
				4). Membuat berita acara penilaian barang milik daerah															
				5). Membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah															
				6). Membuat Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah															
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	303,424,000	Jumlah dokumen pemindahtanganan barang milik daerah	2 Dokumen	1). Melakukan rekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtanggankan dari seluruh SKPD															
				2). Mengelompokkan barang yang akan dipindahtanggankan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya															
				3). Membuat persetujuan pemindahtanganan dari wali kota															
				4). Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah															
				5). Menyusun dokumen pemindahtanganan barang milik daerah															

	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76,939,000	Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah	38 Dokumen	1). Melaksanakan rekonsiliasi antara pencatatan pengurus barang dalam KIB dengan fungsi penatausahaan barang daerah													
					2). Membuat berita acara hasil rekonsiliasi barang milik daerah													
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76,939,000	Jumlah laporan barang milik daerah	2 Dokumen	Menyusun laporan Barang Milik Daerah													
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25,000,000	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	100 Orang	Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah													

		Penanggung Jawab
November	Desember	
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris

		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris

		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris

		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris

		Sekretaris

		Sekretaris
		Sekretaris
		Sekretaris
		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Anggaran

		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Akuntansi

		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Aset Daerah

		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah

		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah

		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah
		Kepala Bidang Aset Daerah